

RENCANA AKSI

PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA PER TRIWULAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

No.	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				PELAKSANA
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Produktifitas Kehutanan	Produksi Kayu = 308.000M3/thn	TW 1 : 30.800 TW 1 : 77.000 TW 1 : 77.000 TW 1 : 123.200	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengendalian PBPHH	Jumlah unit pelaksanaan pembinaan dan pengendalian PBPHH = 113 Unit	Unit	TW1 : -- TW 2 : 56 TW 3 : 57 TW 4 : --	Kabid Pemanfaatan Hutan
2.	Meningkatnya Produktifitas Kehutanan	Produksi Kayu = 308.000M3/thn	TW 1 : 30.800 TW 1 : 77.000 TW 1 : 77.000 TW 1 : 123.200	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan pembangunan industri dan pemeriksaan sumber bahan baku	Jumlah unit pemeriksaan pembangunan industri dan pemeriksaan sumber bahan baku = 15 Unit	unit	TW 1 : 7 TW 2 : 8 TW 3 : - TW 4 : -	Kabid Pemanfaatan Hutan
3.	Meningkatnya Produktifitas Kehutanan	Produksi Kayu = 308.000M3/thn	TW 1 : 30.800 TW 1 : 77.000 TW 1 : 77.000 TW 1 : 123.200	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengawasan PBPH-HHK-HA/HT	Jumlah unit pelaksanaan pengendalian dan pengawasan PBPH-HHK-HA/HT = 11 Unit	unit	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 2	Kabid Pemanfaatan Hutan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Meningkatnya Produktifitas Kehutanan	Produksi Kayu = 308.000M3/thn	TW 1 : 30.800 TW 1 : 77.000 TW 1 : 77.000 TW 1 : 123.200	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Fasilitasi, sosialisasi dan Identifikasi Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi = 3 izin	izin	TW 1 : 1 TW 2 : 1 TW 3 : 1 TW 4 : --	Kabid Pemanfaatan Hutan
5.	Meningkatnya Produktifitas Kehutanan	Produksi Kayu = 308.000M3/thn	TW 1 : 30.800 TW 1 : 77.000 TW 1 : 77.000 TW 1 : 123.200	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Pengumpulan Data dan Bahan Etalase Hutan Maluku	Jumlah lokasi pelaksanaan pengumpulan data dan bahan etalase hutan Maluku = 10 Lokasi	lokasi	TW 1 : 2 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 2	Kabid Pemanfaatan Hutan
6.	Meningkatnya Produktifitas Kehutanan	Produksi Kayu = 308.000M3/thn	TW 1 : 30.800 TW 1 : 77.000 TW 1 : 77.000 TW 1 : 123.200	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Pelatihan Operator SIPUHH	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan operator SIPUHH = 40 peserta	peserta	TW 1 : -- TW 2 : 40 TW 3 : -- TW 4 : --	Kabid Pemanfaatan Hutan
7.	Meningkatnya Produktifitas Kehutanan	Produksi Kayu = 308.000M3/thn	TW 1 : 30.800 TW 1 : 77.000 TW 1 : 77.000 TW 1 : 123.200	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Pengendalian Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT)	Jumlah lokasi pelaksanaan pengendalian pemegang Hak Atas Tanah = 14 lokasi	lokasi	TW 1 : 3 TW 2 : 4 TW 3 : 4 TW 4 : 3	Kabid Pemanfaatan Hutan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Meningkatnya Produktifitas Kehutanan	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu = 820 ton/tahun	TW 1 : 120 TW 2 : 180 TW 3 : 240 TW 4 : 280	Pengelolaan Hutan	Pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung	Volume produksi HHBK 820 ton/thn	Ton	TW 1 : 120 TW 2 : 180 TW 3 : 240 TW 4 : 280	Kabid Pemanfaatan Hutan
9.	Meningkatnya Produktifitas Kehutanan	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu = 820 ton/tahun	TW 1 : 120 TW 2 : 180 TW 3 : 240 TW 4 : 280	Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan pengembangan, penyediaan data dan informasi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan di Maluku	Jumlah lokasi pelaksanaan pengembangan, penyediaan data dan informasi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan di Maluku = 4 lokasi	lokasi	TW 1 : -- TW 2 : 2 TW 3 : 2 TW 4 : --	Kabid Pemanfaatan Hutan
10.	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 50% TW 2 : 50% TW 3 : -- TW 4 : --	Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya 7 dokumen (Renja/RKA/DPA/PK/LKIP/LPPD/LKPJ)	dokumen	TW 1 : 4 dok TW 2 : 3 dok TW 3 : -- TW 4 : --	Sekretaris
11.	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 100% TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : --	Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai UPTD KPH	Jumlah UPTD KPH yang dilakukan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawainya = 11 UPTD KPH	UPTD KPH	TW 1 : 11unit TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : --	Kasubag Umum dan Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : 63% TW 3 : 37% TW 4 : --	Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan= 11 lokasi	lokasi	TW 1 : -- TW 2 : 7 TW 3 : 4 TW 4 : --	Kasubag Umum dan Kepegawaian
13.	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya kegiatan pendukung administrasi perkantoran Dinas = 12 Bulan	bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kasubag Keuangan & Aset
14.	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : 100% TW 3 : -- TW 4 : --	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas Roda 4 dan Roda 2	Tersedianya kendaraan dinas operasional 5 unit	unit	TW 1 : -- TW 2 : 5 unit TW 3 : -- TW 4 : --	Kasubag Umum dan Kepegawaian
15.	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa penunjang operasional perkantoran = 12 bulan	bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kasubag Keuangan & Aset

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya pemeliharaan sarpras operasional dinas = 12 Bulan	bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
17.	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Pengelolaan Hutan	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Operasionalisasi KPH	Terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Operasionalisasi KPH = 12 Bulan	bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Sekretaris
18.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas hutan berbasis kepulauan	Rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis = 0,34%	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : 0,34% TW 4 : --	Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Terlaksananya luas pembangunan hutan rakyat = 300 Ha	Ha	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : 300 Ha TW 4 : --	Kepala Bidang Pengelolaan DAS,RHL dan KSDAE
19.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas hutan berbasis kepulauan	Rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis = 0,34%	TW 1 : -- TW 2 : 0,34 % TW 3 : -- TW 4 : --	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan Kritis pada Pembangunan Penghijauan Lingkungan di luar Kawasan Hutan Negara	Luas pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi = 27, 2 Ha	Ha	TW 1 : -- TW 2 : 27,2 Ha TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Bidang Pengelolaan DAS,RHL dan KSDAE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas hutan berbasis kepulauan	Rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis = 0,34%	TW 1 : 0,14% TW 2 : -- TW 3 : 0,20% TW 4 : --	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Kegiatan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah lokasi pengembangan perbenihan untuk kegiatan rehabilitasi lahan kritis = 9 Lokasi	lokasi	TW 1 : 4 TW 2 : -- TW 3 : 5 TW 4 : --	Kepala Bidang Pengelolaan DAS,RHL dan KSDAE
21.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas hutan berbasis kepulauan	Rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis = 0,34%	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : 0,34%	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Jumlah lokasi pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan kritis = 11 Lokasi	lokasi	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : 11	Kepala Bidang Pengelolaan DAS,RHL dan KSDAE
22.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas hutan berbasis kepulauan	Rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis = 0,34%	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : 0,34% TW 4 : --	Konservasi SDA Hayati dan Ekosstemnya	Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah lokasi pengelolaan daerah penyangga pada kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi Maluku = 3 lokasi	lokasi	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : 3 TW 4 : --	Kepala Bidang Pengelolaan DAS,RHL dan KSDAE
23.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas hutan berbasis kepulauan	Rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis = 0,34%	TW 1 : ----- TW 2 : ----- TW 3 : ----- TW 4 : 0,34%	Pengelolaan DAS	Terlaksananya Penerapan Teknik Konservatif Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah lokasi dan unit pengelolaan DAS lintas daerah dan dalam daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku = 400 Unit	Unit	TW 1 : ---- TW 2 : ---- TW 3 : ---- TW 4 : 400	Kepala Bidang Pengelolaan DAS,RHL dan KSDAE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas hutan berbasis kepulauan	Rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis = 0,34%	TW 1 : ----- TW 2 : ----- TW 3 : ----- TW 4 : 0,34%	Pengelolaan DAS	Terlaksananya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Tercapainya jumlah lokasi identifikasi kerawanan tanah longsor dan penguatan lereng dengan metode bioengineering = 3 Lokasi	lokasi	TW 1 : ---- TW 2 : ---- TW 3 : ---- TW 4 : 3	Kepala Bidang Pengelolaan DAS,RHL dan KSDAE
25.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 : 69% TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : --	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan kerusakan hutan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan	Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi pencegahan kerusakan hutan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan = 7 Lokasi	lokasi	TW 1 : 7 TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Penyuluhan dan pemberdayaan Masyarakat Adat
36.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 : -- TW 2 : 34% TW 3 : -- TW 4 : 35%	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya operasi gabungan pengamanan hutan	Jumlah lokasi pelaksanaan operasi gabungan pengamanan hutan = 7 Lokasi	lokasi	TW 1 : -- TW 2 : 3 TW 3 : -- TW 4 : 4	Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Penyuluhan dan pemberdayaan Masyarakat Adat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 : 17,25% TW 2 : 17,25% TW 3 : 17,25% TW 4 : 17,25%	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi pelaksanaan patroli pengamanan hutan = 8 Lokasi	Lokasi	TW 1 : 2 TW 2 : 2 TW 3 : 2 TW 4 : 2	Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Penyuluhan dan pemberdayaan Masyarakat Adat
38.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 : 69% TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : --	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pengendalian Karhutla	Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi pengendalian Karhutla = 15 Lokasi	Lokasi	TW 1 : 15 TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Penyuluhan dan pemberdayaan Masyarakat Adat
39.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : 69%	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya kegiatan monitoring daerah rawan Karhutla	Jumlah lokasi monitoring daerah rawan Karhutla = 10 Lokasi	Lokasi	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : 10	Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Penyuluhan dan pemberdayaan Masyarakat Adat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 : -- TW 2 : 69% TW 3 : -- TW 4 : --	Pengelolaan Hutan	Terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)	Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) = 10 Kelompok	Kelompok	TW 1 : -- TW 2 : 10 TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Penyuluhan dan pemberdayaan Masyarakat Adat
41.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 : -- TW 2 : 69% TW 3 : -- TW 4 : --	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya pemadaman kebakaran hutan dan lahan	Jumlah lokasi monitoring evaluasi penggunaan, pemeliharaan peralatan Damkarhutla pada IUPHHK-HA = 4 Lokasi	Lokasi	TW 1 : -- TW 2 : 4 TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Penyuluhan dan pemberdayaan Masyarakat Adat
42.	Pemberian Akses Legal kepada Masyarakat sekitar Hutan melalui Skema Perhutanan Sosial	Jumlah unit pemanfaatan areal perhutanan sosial = 15 Unit	TW 1 : 5 TW 2 : 5 TW 3 : 5 TW 4 : --	Diklat, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya kegiatan pengembangan perhutanan sosial dengan sistem Agroforestry	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang dilakukan Kegiatan Pengembangan Perhutanan Sosial dengan Sistem Agroforestry = 14 Kelompok	Kelompok	TW 1 : 4 TW 2 : 5 TW 3 : 5 TW 4 : --	Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Penyuluhan dan pemberdayaan Masyarakat Adat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	Pemberian Akses Legal kepada Masyarakat sekitar Hutan melalui Skema Perhutanan Sosial	Jumlah unit pemanfaatan areal perhutanan sosial = 15 Unit	TW 1 :-- TW 2 : 5 TW 3 : 5 TW 4 : 5	Diklat, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya monitoring evaluasi kelembagaan dan pengembangan usaha KUPS dan KTH	Jumlah KTH yang dilakukan monitoring evaluasi kelembagaan dan pengembangan usaha KUPS dan KTH = 30 KTH dan 76 KUPS	Kelompok	TW 1 : -- TW 2 : 76 TW 3 : 30 TW 4 : --	Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Penyuluhan dan pemberdayaan Masyarakat Adat
44.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 :-- TW 2 : 35% TW 3 : 34% TW 4 : --	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Kegiatan identifikasi masyarakat hukum adat, inventarisasi hutan tingkat provinsi dan inventarisasi potensi hasil hutan	Jumlah lokasi pelaksanaan identifikasi masyarakat hukum adat, inventarisasi hutan tingkat provinsi, dan inventarisasi potensi hasil hutan = 17 Lokasi	Lokasi	TW 1 : -- TW 2 : 9 TW 3 : 8 TW 4 : --	Kepala Bidang Perencanaan Hutan
45.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 :-- TW 2 : -- TW 3 : 69% TW 4 : --	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya kegiatan koordinasi percepatan pengakuan hutan adat	Jumlah lokasi koordinasi percepatan pengakuan hutan adat = 7 Lokasi	Lokasi	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : 7 TW 4 : --	Kepala Bidang Perencanaan Hutan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 : 69% TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : --	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) IUPHHK-HA/HT pada PB-PH Hutan Produksi	Jumlah lokasi pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) IUPHHK-HA/HT pada PB-PH Hutan Produksi = 4 Lokasi	Lokasi	TW 1 : 4 TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Bidang Perencanaan Hutan
<i>UPTD KPH AMBON</i>									
47.	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya administrasi umum UPTD KPH Ambon	Terlaksananya kegiatan pendukung administrasi perkantoran UPTD KPH= 12 Bulan	bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
48	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : 100% TW 3 : -- TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan UPTD KPH	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan UPTD KPH pada pengadaan kendaraan dinas lapangan = 1 Unit	unit	TW 1 : -- TW 2 : 1 TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor = 12 bulan	bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
50	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : 40% TW 3 : 40% TW 4 : 20%	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Jumlah waktu penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana operasional KPH = 9 bln	Bulan	TW 1 : -- TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Seksi Perencanaan & Pemanfaatan Hutan
51	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 : -- TW 2 : 35% TW 3 : 34% TW 4 : --	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan patroli pengamanan hutan = 2 Lokasi	Lokasi	TW 1 : -- TW 2 : 1 TW 3 : 1 TW 4 : --	Kepala Seksi Perlindungan , KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 : -- TW 2 : 34% TW 3 : 35% TW 4 : --	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah lokasi kegiatan sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan serta lokasi monitoring dan identifikasi daerah rawan kebakaran hutan = 3 Lokasi	Lokasi	TW 1 : -- TW 2 : 1 TW 3 : 2 TW 4 : --	Kepala Seksi Perlindungan , KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat
53	Pemberian Akses Legal kepada Masyarakat sekitar Hutan melalui Skema Perhutanan Sosial	Jumlah unit pemanfaatan areal perhutanan sosial = 15 Unit	TW 1 : -- TW 2 : 15 TW 3 : -- TW 4 : --	Diklat, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi izin perhutanan sosial = 2 Lokasi	Lokasi	TW 1 : -- TW 2 : 2 TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Seksi Perlindungan , KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat
<i>UPTD KPH Maluku Tengah</i>									
54	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Administrasi Keuangan UPTD KPH	Persentase pengelolaan administrasi keuangan UPTD KPH = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Administrasi Umum UPTD KPH	Terlaksananya kegiatan pendukung administrasi perkantoran UPTD KPH= 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
56	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : 100% TW 3 : -- TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan UPTD KPH pada pengadaan kendaraan dinas lapangan = 1 Unit	Unit	TW 1 : -- TW 2 : 1 TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
57	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan surat menyurat kantor = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
58	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas operasional = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
60	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 : 23% TW 2 : 23% TW 3 : -- TW 4 : 23%	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan patroli pengamanan hutan = 6 Lokasi	Lokasi	TW 1 : 2 TW 2 : 2 TW 3 : -- TW 4 : 2	Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat
<i>UPTD KPH Seram Bagian Barat</i>									
61	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Administrasi Keuangan UPTD KPH	Persentase pengelolaan administrasi keuangan UPTD KPH = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
62	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Administrasi Umum UPTD KPH	Terlaksananya kegiatan pendukung administrasi perkantoran UPTD KPH= 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : 100% TW 3 : -- TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan UPTD KPH pada pengadaan kendaraan dinas lapangan = 1 Unit	Unit	TW 1 : -- TW 2 : 1 TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
64	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 33% TW 2 : 33% TW 3 : 34% TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan surat menyurat kantor = 9 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
65	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
66	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
67	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas operasional = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	Meningkatnya Produktifitas Kehutanan	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu = 820 ton/tahun	TW 1 : 220 TW 2 : 300 TW 3 : 300 TW 4 : --	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan inventarisasi potensi hasil hutan bukan kayu = 5 lokasi	Lokasi	TW 1 : 1 TW 2 : 2 TW 3 : 2 TW 4 : --	Kepala Seksi Perencanaan & Pemanfaatan Hutan
69	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 : 17,25% TW 2 : 17,25% TW 3 : 17,25% TW 4 : 17,25%	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan patroli pengamanan hutan = 4 Lokasi	Lokasi	TW 1 : 1 TW 2 : 1 TW 3 : 1 TW 4 : 1	Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat
<i>UPTD KPH Seram Bagian Timur</i>									
70	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Administrasi Keuangan UPTD KPH	Persentase pengelolaan administrasi keuangan UPTD KPH = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
71	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Administrasi Umum UPTD KPH	Terlaksananya kegiatan pendukung administrasi perkantoran UPTD KPH= 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : 100% TW 3 : -- TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan UPTD KPH pada pengadaan kendaraan dinas lapangan = 1 Unit	Unit	TW 1 : -- TW 2 : 1 TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
73	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
74	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : 100% TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Persentase terlaksananya pemeliharaan gedung dan bangunan kantor = 100%	Persen	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : 100 TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
75	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : 50 % TW 3 : 50% TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Persentase terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor = 100%	Persen	TW 1 : -- TW 2 : 50 TW 3 : 50 TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 : 17,25% TW 2 : 17,25% TW 3 : 17,25% TW 4 : 17,25%	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan pengamanan peredaran hasil hutan = 6 Lokasi	Lokasi	TW 1 : 2 TW 2 : 2 TW 3 : 1 TW 4 : 1	Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat
<i>UPTD KPH Buru</i>									
77	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Administrasi Keuangan UPTD KPH	Persentase pengelolaan administrasi keuangan UPTD KPH = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
78	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Administrasi Umum UPTD KPH	Terlaksananya kegiatan pendukung administrasi perkantoran UPTD KPH= 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
79	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : 100% TW 3 : -- TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan UPTD KPH pada pengadaan kendaraan dinas lapangan = 1 Unit	Unit	TW 1 : -- TW 2 : 1 TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
81	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
82	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas operasional = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
83	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : 100% TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Persentase terlaksananya pemeliharaan gedung dan bangunan kantor = 100%	Persen	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : 100 TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	Meningkatnya Produktifitas Kehutanan	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu = 820 ton/tahun	TW 1 : -- TW 2 : 820 TW 3 : -- TW 4 : --	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Persentase pelaksanaan kegiatan inventarisasi potensi hasil hutan bukan kayu = 100%	Persen	TW 1 : -- TW 2 : 100 TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Seksi Perencanaan & Pemanfaatan Hutan
85	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 : -- TW 2 : 34,5% TW 3 : 34,5% TW 4 : --	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan patroli pengamanan hutan = 10 Lokasi	Lokasi	TW 1 : -- TW 2 : 5 TW 3 : 5 TW 4 : --	Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat
<i>UPTD KPH Buru Selatan</i>									
86	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Administrasi Keuangan UPTD KPH	Persentase pengelolaan administrasi keuangan UPTD KPH = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
87	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Administrasi Umum UPTD KPH	Terlaksananya kegiatan pendukung administrasi perkantoran UPTD KPH= 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : 100% TW 3 : -- TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan UPTD KPH pada pengadaan kendaraan dinas lapangan = 1 Unit	Unit	TW 1 : -- TW 2 : 1 TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
89	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan surat menyurat kantor = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
90	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
91	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : 100% TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas operasional = 3 Bulan	Bulan	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : 3 TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
93	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 : 69% TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : --	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan patroli pengamanan hutan = 5 Lokasi	Lokasi	TW 1 : 5 TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Seksi Perlindungan , KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat
<i>UPTD KPH Maluku Tenggara</i>									
94	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Administrasi Keuangan UPTD KPH	Persentase pengelolaan administrasi keuangan UPTD KPH = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
95	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Administrasi Umum UPTD KPH	Terlaksananya kegiatan pendukung administrasi perkantoran UPTD KPH= 12 Bulan	Persen	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : 100% TW 3 : -- TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan UPTD KPH pada pengadaan kendaraan dinas lapangan = 1 Unit	Unit	TW 1 : -- TW 2 : 1 TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
97	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan surat menyurat kantor = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
98	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
99	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : 69% TW 4 : --	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan patroli pengamanan hutan = 3 Lokasi	Lokasi	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : 3 TW 4 : --	Kepala Seksi Perlindungan , KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>UPTD KPH Tual</i>								
100	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Administrasi Keuangan UPTD KPH	Persentase pengelolaan administrasi keuangan UPTD KPH = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
101	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Administrasi Umum UPTD KPH	Terlaksananya kegiatan pendukung administrasi perkantoran UPTD KPH= 12 Bulan	Persen	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
102	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : 100% TW 3 : -- TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan UPTD KPH pada pengadaan kendaraan dinas lapangan = 1 Unit	Unit	TW 1 : -- TW 2 : 1 TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
103	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas operasional = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
105	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 : 17,25% TW 2 : 17,25% TW 3 : 17,25% TW 4 : 17,25%	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan pengamanan peredaran hasil hutan = 4 Lokasi	Lokasi	TW 1 : 1 TW 2 : 1 TW 3 : 1 TW 4 : 1	Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat
106	Pemberian Akses Legal kepada Masyarakat sekitar Hutan melalui Skema Perhutanan Sosial	Jumlah unit pemanfaatan areal perhutanan sosial = 15 Unit	TW 1 : 8 TW 2 : 7 TW 3 : -- TW 4 : --	Diklat, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan perhutanan sosial = 2 Lokasi	Lokasi	TW 1 : 1 TW 2 : 1 TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat
<i>UPTD KPH Kep.Aru</i>									
107	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Administrasi Keuangan UPTD KPH	Persentase pengelolaan administrasi keuangan UPTD KPH = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Administrasi Umum UPTD KPH	Terlaksananya kegiatan pendukung administrasi perkantoran UPTD KPH= 12 Bulan	Persen	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
109	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : 100% TW 3 : -- TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan UPTD KPH pada pengadaan kendaraan dinas lapangan = 1 Unit	Unit	TW 1 : -- TW 2 : 1 TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
110	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan surat menyurat kantor = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
111	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
113	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 50% TW 2 : -- TW 3 : 50% TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas operasional = 6 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : -- TW 3 : 3 TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
114	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 50% TW 2 : -- TW 3 : 50% TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Persentase terlaksananya pemeliharaan gedung dan bangunan kantor = 100%	Persen	TW 1 : 50 TW 2 : -- TW 3 : 50 TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
115	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : 34,5% TW 4 : 34,5%	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan pengamanan peredaran hasil hutan = 2 Lokasi	Lokasi	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : 1 TW 4 : 1	Kepala Seksi Perlindungan , KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat
<i>UPTD KPH Kep.Tanimbar</i>									
116	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Administrasi Keuangan UPTD KPH	Persentase pengelolaan administrasi keuangan UPTD KPH = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Administrasi Umum UPTD KPH	Terlaksananya kegiatan pendukung administrasi perkantoran UPTD KPH= 12 Bulan	Persen	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
118	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : 100% TW 3 : -- TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan UPTD KPH pada pengadaan kendaraan dinas lapangan = 1 Unit	Unit	TW 1 : -- TW 2 : 1 TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
119	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 100% TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan UPTD KPH pada pengadaan mebel = 1 Set	Set	TW 1 : 1 TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
120	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 100% TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan UPTD KPH pada pengadaan peralatan dan mesin = 2 Unit	unit	TW 1 : 2 TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
122	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
123	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : 100% TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas operasional = 3 Bulan	Bulan	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : 3 TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
124	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 100% TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Persentase terlaksananya pemeliharaan gedung dan bangunan kantor = 100%	Persen	TW 1 : 100 TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
125	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Kualitas penutupan lahan = 69%	TW 1 : 23% TW 2 : 23% TW 3 : 23% TW 4 : --	Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan patroli pengamanan hutan = 3 Lokasi	Lokasi	TW 1 : 1 TW 2 : 1 TW 3 : 1 TW 4 : --	Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>UPTD KPH MBD</i>								
126	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Administrasi Keuangan UPTD KPH	Persentase pengelolaan administrasi keuangan UPTD KPH = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
127	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Administrasi Umum UPTD KPH	Terlaksananya kegiatan pendukung administrasi perkantoran UPTD KPH= 12 Bulan	Persen	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
127	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : 100% TW 3 : -- TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan UPTD KPH pada pengadaan kendaraan dinas lapangan = 1 Unit	Unit	TW 1 : -- TW 2 : 1 TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
128	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : 100% TW 3 : -- TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan UPTD KPH pada pengadaan mebel = 2 Unit	Unit	TW 1 : -- TW 2 : 2 TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : 100% TW 3 : -- TW 4 : --	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan UPTD KPH pada pengadaan peralatan dan mesin lainnya = 1 Unit	Unit	TW 1 : -- TW 2 : 1 TW 3 : -- TW 4 : --	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
130	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
131	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
132	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : 25% TW 2 : 25% TW 3 : 25% TW 4 : 25%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas operasional = 12 Bulan	Bulan	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	Meningkatnya kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase peningkatan kinerja OPD = 100%	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : 100%	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan UPTD KPH	Persentase terlaksananya pemeliharaan gedung dan bangunan kantor = 100%	Persen	TW 1 : -- TW 2 : -- TW 3 : -- TW 4 : 100	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Keterangan :
TW = Triwulan

Ambon , Maret 2022

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku,



Ir. SADULIE, M.Si. IPU

Perbina Utama Madya

NIP. 19680828 199403 1 010